

Efektivitas Kebijakan Indonesia dan Vietnam dalam Menekan *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*: Studi Komparatif 2019-2024



Disusun Oleh:

Nur Ulfa Amalia

NIM. 1221004010

Dosen Pembimbing:

Asmiati Abdul Malik, S.I.P., S.Kom., M.A., Ph.D

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS BAKRIE
JAKARTA
2026**

Efektivitas Kebijakan Indonesia dan Vietnam dalam Menekan *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*: Studi Komparatif 2019-2024

TUGAS AKHIR

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu
Politik Universitas Bakrie, Program Studi Ilmu Politik, Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Bakrie**



Disusun Oleh:

Nur Ulfa Amalia

NIM. 1221004010

Dosen Pembimbing:

Asmiati Abdul Malik, S.I.P., S.Kom., M.A., Ph.D

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS BAKRIE
JAKARTA**

2026

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Ulfa Amalia

NIM : 1221004010

Program Studi : Ilmu Politik

Menyatakan bahwa:

1. Penulisan penelitian ini ditulis dengan sungguh-sungguh yang berjudul “ Efektivitas Kebijakan Indonesia dan Vietnam dalam Menekan *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*: Studi Komparatif 2019-2024” adalah karya orisinal saya dan belum pernah dipublikasikan sebelumnya serta di bawah bimbingan Miss Asmiati Abdul Malik, S.I.P., S.Kom., M.A., Ph.D
2. Semua aspek penelitian yang saya lakukan, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, analisis, hingga interpretasi hasil, dilakukan dengan penuh kejujuran dan tanpa melakukan plagiarisme atau pelanggaran hak cipta pihak lain.

Demikian pernyataan orisinalitas penelitian ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan saya siap menanggung segala konsekuensi yang timbul apabila terbukti melakukan pelanggaran etika penelitian.

Atas perhatian dan pertimbangannya, saya mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 17 Februari 2026

Hormat saya,



Nur Ulfa Amalia

HALAMAN PENGESAHAN
HALAMAN PERSETUJUAN

Tugas Akhir ini diajukan oleh:

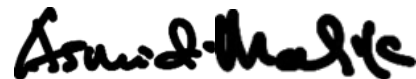
Nama : Nur Ulfa Amalia
NIM : 1221004010
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul Skripsi :

“ Efektivitas Kebijakan Indonesia dan Vietnam dalam Menekan *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*: Studi Komparatif 2019-2024.”

Telah berhasil menyelesaikan revisi proposal tugas akhir dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan dalam mengikuti sidang tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Politik konsentrasi Hubungan Internasional, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Bakrie.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Asmiati Abdul Malik, S.I.P., S.Kom., M.A., Ph.D



Pembahas 1 : Insan Harapan Harahap, S.Sos., M.AP.



Pembahas 2 : Sellita, S.Sos, M.A



Ditetapkan di Jakarta
Tanggal : 17 Februari 2026

MOTTO

THE WAY TO GET STARTED IS TO
QUIT TALKING AND BEGIN DOING
-WALT DISNEY-

PERSEMBAHAN

Penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Keluarga penulis yaitu Orang tua (Mamah dan Papah) serta kakak-kakak ku (Kakak Herul dan Kakak Imma) yang selalu memberikan doa, dukungan dan motivasi untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Dosen Pembimbing atau supervisor saya yaitu Miss Asmiati Abdul Malik, S.I.P., S.Kom., M.A., Ph.D, terima kasih banyak atas bimbingannya, arahnya, nasehatnya, kesabarannya dalam memberikan arahan yang sangat berharga dalam proses awal sampai akhir penulisan skripsi ini, mustahil berada di titik ini tanpa arahan dari beliau.
3. Teman-teman seperjuangan penulis yang selalu memberikan semangat, dukungan moral, dan saran membangun dalam menghadapi segala tantangan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Terima kasih untuk semua orang disekitarku yang selalu memberikan semangat dan doa dan memberikan keyakinan bahwa penulis bisa menghadapi dan melewati tahap ini.
5. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie dan Staf yang memberikan sangat banyak ilmu pengetahuan, pengalaman, dan arahan selama proses pendidikan yang sangat luar biasa.
6. Terima kasih banyak atas segala doa, dukungan, arahan, bantuan yang telah diberikan, semoga semua hal yang telah dikorbankan kepada penulis selalu diberkahi oleh Allah SWT.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia, dan berkahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Efektivitas Kebijakan Indonesia dan Vietnam dalam Menekan *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*: Studi Komparatif 2019-2024" ini sebagai salah satu syarat utama untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik di Universitas Bakrie. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta seluruh umat Muslim yang istiqomah menjalankan ajaran-Nya.

Skripsi ini disusun sebagai wujud nyata dari usaha dan perjuangan penulis dalam mendalami studi tentang kebijakan pengelolaan sumber daya laut serta upaya kedua negara, Indonesia dan Vietnam, dalam menanggulangi praktik ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur dalam kegiatan perikanan. Semoga hasil dari studi ini dapat memberikan manfaat yang besar, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan, maupun bagi pemerintah dan seluruh masyarakat yang peduli terhadap keberlanjutan sumber daya alam laut kita.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak lepas dari bimbingan, doa, dan dukungan dari banyak pihak yang sangat berarti dan tak ternilai harganya. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Keluarga tercinta, Mamah dan Papah, yang merupakan sumber kekuatan dan inspirasi terbesar dalam hidup penulis. Terima kasih atas pengorbanan yang tak terhingga, atas cinta tanpa batas, doa yang selalu mengiringi setiap langkahku, serta pendidikan dan nilai-nilai kehidupan yang telah diberikan dari sejak kecil. Mamah dan Papah, terima kasih telah mengajarkan penulis arti ketekunan, keikhlasan, kemandirian dan keberanian. Penulis bersyukur memiliki orang tua seperti kalian yang selalu mendorong untuk terus belajar dan berjuang tanpa membatasi apapun itu. Meskipun jarak yang begitu sangat jauh memisahkan, doa dan cinta kalian selalu menyertai langkah penulis tentunya. Semoga penulis dapat membanggakan Mamah dan Papah. Kuponjatkan juga doa terbaik untuk kalian di sana yang sangat sulit untukku jangkau, *Love you Mom and Dad, you are truly the best parents in the world.*
- Kaka Hairul, yang dengan penuh ketulusan dan pengorbanan selalu mengusahakan mencari jalan agar penulis bisa menuntut ilmu di Universitas Bakrie. Terima kasih atas segala dukungan moral, finansial, dan doa yang tak pernah putus, terima kasih untuk tidak pernah berkata “tidak” di setiap proses pendidikan penulis, terima kasih

sudah kebersamaan penulis bertumbuh dan berkembang. *You are my hero after Papah* dalam hidupku yang selalu hadir di saat penulis merasa lemah dan putus asa. Maaf apabila penulis masih sering mengecewakan. Gelar sarjana ini penulis persembahkan untuk Kakak sebagai bukti bahwa perjuangan bersama tidak pernah sia-sia.

- Kaka Imma, yang setia dengan ketulusan selalu memberikan dukungan, arahan, doa agar bisa selalu lebih kuat menghadapi semua tantangan yang ada, terima kasih sudah menjadi tempat penulis bercerita selama penulisan skripsi. Penulis persembahkan gelar ini sebagai bukti bahwa perjuangan bersama tidak pernah sia-sia.
- Dosen Pembimbing, Miss Asmiati Abdul Malik, S.I.P., S.Kom., M.A., Ph.D., yang dengan kesabaran, keikhlasan, dan berjuta pengalaman berharga, telah membimbing, mengarahkan, serta memberikan motivasi yang tak pernah putus. Tanpa bimbingan beliau, tentu skripsi ini tidak akan selesai dengan baik. Terima kasih atas segala ilmu, arahan, dan dorongan yang selalu diberikan. Terima kasih selalu memberikan pengalaman dan hal yang mustahil didapatkan di diri orang lain. Terima kasih telah mengenalkan banyak hal selama berproses pendidikan di Universitas Bakrie
- Para dosen penguji, Bapak Insan Harapan Harahap, S.Sos., M.AP dan Miss Sellita, S.Sos, M.A, sebagai dosen penguji penulis dalam penelitian ini, yang sangat banyak memberikan wawasan sehingga saya dapat memperbaiki kekurangan dalam penulisan ini, memberikan masukan yang dapat memaksimalkan hasil penelitian saya. Wawasan, masukan serta arahan yang disampaikan dapat menjadikan analisis dalam sebuah kasus penelitian ini memberikan hasil yang lebih komprehensif.
- Sahabat kecilku, Rosalina, yang selalu mendukung apapun yang penulis ingin lakukan, mendengarkan keluh kesah penulis, serta menjadi teman setia dari kecil hingga menyelesaikan tahap akhir studi ini dan semoga selalu selamanya. Terima kasih atas kebersamaan, canda tawa, dan kekuatan yang diberikan, yang membuat perjalanan ini terasa lebih ringan dan penuh makna.
- Teman-teman dan rekan-rekan seperjuangan, Rara, Alia, Sherly, Raditya, Azhra, Alifah, Galuh Luthfia, Selsy, teman teman bimbingan tugas akhir yang dibimbing oleh Miss Eimi dan Kak Panca, Kak Azila, yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan dan dalam proses penyusunan skripsi. Kalian adalah bagian dari perjalanan hidupku yang tak terlupakan. Terima kasih atas segala kebersamaan, tawa, dan semangat yang kalian berikan.

- Pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberi berbagai dukungan dan doa, yang turut membantu terselesaikannya skripsi ini. Semoga kebaikan kalian semua mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga Allah SWT senantiasa memberkati setiap usaha, langkah, dan doa kita semua.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi siapa saja yang membacanya. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan memberkati seluruh langkah kita dalam menegakkan keadilan, keberlanjutan sumber daya alam, dan kedamaian di bumi ini.

Jakarta, 17 Februari 2026

Hormat saya,



Nur Ulfa Amalia

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademik Universitas Bakrie, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Ulfa Amalia
NIM : 1221004010
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Jenis Tugas Akhir : Skripsi Penelitian Kualitatif

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bakrie **Hak Royalti Non Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“ Efektivitas Kebijakan Indonesia dan Vietnam dalam Menekan *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*: Studi Komparatif 2019-2024.”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini, Universitas Bakrie berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan Tugas Akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta untuk kepentingan akademis.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal: 17 Februari 2026

Yang Menyatakan,



Nur Ulfa Amalia

ABSTRAK

Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing merupakan ancaman transnasional yang serius bagi keberlanjutan sumber daya laut di Asia Tenggara. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan efektivitas kebijakan penanggulangan IUU Fishing di Indonesia dan Vietnam selama periode 2019–2024. Menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus komparatif, penelitian ini menganalisis kebijakan kedua negara melalui lensa Teori Realisme dan enam indikator evaluasi kebijakan publik William N. Dunn (efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan). Temuan penelitian menunjukkan adanya divergensi strategi yang didorong oleh kepentingan nasional yang berbeda. Indonesia, dengan motif kedaulatan wilayah (*sovereignty driven*), menerapkan pendekatan hard power melalui patroli fisik yang intensif dan penegakan hukum tegas, yang terbukti efektif memulihkan stok ikan namun berbiaya tinggi (inefisien) dan menghadapi tantangan pemerataan subsidi bagi nelayan kecil. Sebaliknya, Vietnam, dengan motif keamanan ekonomi (*economy driven*) akibat tekanan "Kartu Kuning" Uni Eropa, menerapkan pendekatan kepatuhan (*compliance*) berbasis teknologi *Vessel Monitoring System* (VMS) dan reformasi regulasi pelabuhan. Strategi Vietnam terbukti lebih efisien secara anggaran dan merata dalam mendistribusikan subsidi teknologi, meskipun masih menghadapi tantangan kepatuhan operasional di laut lepas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak ada model tunggal yang sempurna; Indonesia unggul dalam penegakan kedaulatan, sementara Vietnam unggul dalam manajemen pasar dan efisiensi.

Kata Kunci: *IUU Fishing*, Kebijakan Publik, Studi Komparatif, Realisme, Indonesia, Vietnam, William N. Dunn.

ABSTRACT

Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing poses a serious transnational threat to the sustainability of marine resources in Southeast Asia. This study aims to compare the effectiveness of counter-IUU Fishing policies in Indonesia and Vietnam during the 2019–2024 period. Employing a qualitative method with a comparative case study design, this research analyzes both countries' policies through the lens of Realism Theory and William N. Dunn's six public policy evaluation indicators (effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness). The findings reveal a strategic divergence driven by distinct national interests. Indonesia, motivated by sovereignty driven interests, implements a hard power approach through intensive physical patrols and strict law enforcement. This strategy has proven effective in recovering fish stocks but is high-cost (inefficient) and faces challenges in equitable subsidy distribution for small-scale fishers. Conversely, Vietnam, driven by economic security interests due to the European Union's "Yellow Card" pressure, adopts a compliance approach based on Vessel Monitoring System (VMS) technology and port regulation reforms. Vietnam's strategy proves to be more budget-efficient and equitable in distributing technology subsidies, although it still faces operational compliance challenges on the high seas. This study concludes that there is no single perfect model; Indonesia excels in sovereignty enforcement, while Vietnam excels in market management and efficiency.

Keywords: IUU Fishing, Public Policy, Comparative Study, Realism, Indonesia, Vietnam, William N. Dunn.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	viii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>.....	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvi
GLOSARIUM	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	2
1.1.1 Ancaman Global <i>Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing</i>	4
1.1.2 Signifikansi Sektor Perikanan di Indonesia dan Vietnam	10
1.1.3 Kebijakan dalam Menekan IUU <i>Fishing</i> di Indonesia dan Vietnam (2019-2024)	11
1.1.4 Justifikasi Pemilihan Indonesia dan Vietnam sebagai Objek Studi Komparatif.	27
1.2 Kebaruan dalam Penelitian	29
1.2.1 Penelitian sebelumnya	29
1.2.2 Penyempurnaan Penelitian Akademik	41
1.3 Isu Penelitian.....	42
1.4. Rumusan dan Pertanyaan Penelitian	43
1.5. Tujuan Penelitian	43
1.6. Manfaat Penelitian	43
1.6.1 Manfaat Teoritis	44
1.6.2 Manfaat Praktis	44
1.7 Kerangka Konseptual.....	44
1.8. Desain Riset dan Metodologi Penelitian.....	45
2.1 Sistematika Penulisan	46

2.1.1 Bab I Pendahuluan	46
2.1.2. Bab II Kajian Teori	47
2.1.3 Bab III Desain Riset dan Metodologi Penelitian.....	47
2.1.4 Bab IV Pembahasan dan Analisis	48
2.1.5 Bab V Penutup	48
BAB II KERANGKA TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA.....	50
2.0 Pendahuluan.....	50
2.1 Realisme.....	52
2.1.1 Teori turunan dari <i>Grand Theory</i>	54
2.1.2 Teori Implementasi Kebijakan	54
2.1.3 Konsep Efektivitas Kebijakan	56
2.1.3.1 Kebijakan	56
2.1.3.2 Efektivitas	58
2.1.3.3 Teori Efektivitas Kebijakan	60
2.2 Kesimpulan	62
BAB III RISET DESAIN DAN METODOLOGI PENELITIAN	64
3.0 Pendahuluan.....	64
3.1 Metodologi Penelitian: Kualitatif	64
3.2 Posisi Ontologi dan Epistemologi.....	65
3.2.1 Posisi Ontologi.....	66
3.2.2 Posisi Epistemologi.....	67
3.3 Desain Penelitian/Research Design	68
3.3.1 Pemilihan Kasus.....	69
3.4 Pengumpulan data.....	71
3.6 Sampel.....	74
3.6.1 Tipe Sampel.....	75
3.6.2 Besaran Sampel	76
3.7 Lokasi Penelitian.....	76
3.8 Kolase Data.....	77
3.9 Pertimbangan Etik dan Politis.....	77
3.9.1 Pertimbangan Etik.....	77
3.9.2 Pertimbangan Politis	78
3.10 Hambatan Penelitian	79
3.11 Batasan Penelitian.....	79

BAB IV HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN	81
4.0 Pendahuluan.....	81
4.1 Aktor-Aktor yang Terlibat dalam Memberantas Praktik IUU <i>Fishing</i>	82
4.1.1 Aktor-Aktor yang Terlibat dalam Memberantas Praktik IUU <i>Fishing</i> di Indonesia	82
4.1.2 Aktor-Aktor yang Terlibat dalam Memberantas Praktik IUU <i>Fishing</i> di Vietnam	85
4.2 Analisis Perbandingan Efektivitas Kebijakan Indonesia dan Vietnam.....	87
4.3 Analisis Efektivitas dan Efisiensi: Pencapaian Target dan Penggunaan Sumber Daya	89
4.3.1 Efektivitas Kebijakan	89
4.3.1.1 Efektivitas Kebijakan Indonesia.....	90
4.3.1.1.1 Dinamika Keamanan Maritim di Laut Natuna Utara Pasca- Kesepakatan Batas ZEE 2022	95
4.3.1.2 Efektivitas Kebijakan Vietnam	99
4.3.1.2.1 Analisis Dampak Sosial-Ekonomi: Kendala Teknis dan Strategi Bertahan Nelayan Lokal	101
4.3.2 Efisiensi Kebijakan	103
4.3.2.1 Efisiensi Kebijakan Indonesia	104
4.3.2.2 Efisiensi Kebijakan Vietnam	109
4.4 Analisis Kecukupan dan Pemerataan: Dampak Kebijakan bagi Nelayan Lokal.	117
4.4.1 Kecukupan Kebijakan (<i>Adequacy</i>).....	117
4.4.1.1 Kecukupan Kebijakan Indonesia.....	117
4.4.1.2 Kecukupan Kebijakan Vietnam.....	121
4.4.2 Pemerataan Kebijakan (<i>Equity</i>).....	123
4.4.2.1 Pemerataan Kebijakan Indonesia	123
4.4.2.1.1 Analisis Median Untuk Stabilitas Kesejahteraan Nelayan (2020- 2024).....	125
4.4.2.1.2 Kenaikan harga BBM Mempengaruhi Biaya Melaut Nelayan	127
4.4.2.1.3 Perbedaan Akses Subsidi BBM Antara Nelayan Tradisional dan Besar.....	128
4.4.2.1.4 Solusi Pemerintah Atas Diskriminasi Akses BBM Nelayan	129
4.4.3 Pemerataan Kebijakan Vietnam	132
4.4.3.1 Data Subsidi VMS per Provinsi (2024-2025).....	134

4.5 Analisis Responsivitas dan Ketepatan: Kesesuaian Kebijakan dengan Kepentingan Nasional.	135
4.5.1 Responsivitas Kebijakan (<i>Responsiveness</i>).....	135
4.5.2 Responsivitas Kebijakan Indonesia.....	136
4.5.2.1 Kapal Pengawasan Barakuda 01 dan 02.....	138
4.5.2.2 Pengawasan Berbasis Masyarakat (SISWASMAS) dengan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS).....	139
4.5.3 Responsivitas Kebijakan Vietnam	142
4.5.2 Ketepatan Kebijakan (<i>Appropriateness</i>)	148
4.5.2.1 Ketepatan Kebijakan Indonesia	149
4.5.2.2 Data Tahunan Penangkapan Kapal	151
4.5.2.3 Ketepatan Kebijakan Vietnam	153
4.6 Sintesis Hasil Analisis: Perbandingan Pola Efektivitas Indonesia dan Vietnam	155
BAB V PENUTUP	159
5.0 Pendahuluan.....	159
5.1 Kesimpulan	159
5.2 Implikasi Penelitian	161
5.3 Saran	161
DAFTAR PUSTAKA	163

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jumlah KIA Vietnam terdeteksi di ZEE Indonesia Non Sengketa 2021-2022. Sumber: AIS dan Citra Satelit	6
(Sumber: https://oceanjusticeinitiative.org/id/ancaman-iuuf-di-indonesia-maret-juni-2022/)	6
Gambar 1.2 Tren jumlah kapal penangkap ikan Vietnam yang terdeteksi di “wilayah laut Natuna Utara yang tidak disengketakan” menggunakan AIS dan citra satelit dari Maret 2021 hingga April 2024.	6
(Sumber: https://www.scspi.org/en/dtfx/vietnam%E2%80%99s-illegal-fishing-activities-continued-pose-threat-regional-maritime-security-2023%E2%80%932024)	6
Gambar 1.3 Peta Indeks Risiko Penangkapan Ikan Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Teratur (IUU) Global pada tahun 2023 (1=terbaik, 5=terburuk).	7
Sumber: https://www.statista.com/chart/33615/illegal-unreported-and-unregulated--iuu--fishing-risk-index/)	7
Gambar 1.4 Chart Kapal Ilegal yang ditenggelamkan oleh KKP (2019-2024).....	27
(sumber: Olah Data Peneliti, 2025)	27
Gambar 4.1 Pembagian Kewenangan Penegakan hukum IUU Fishing	84
(sumber:Data Tersier tahun 2015)	84
Gambar 4.2 Diagram sistem dokumentasi dan pelacakan tangkapan elektronik (diadaptasi dari Nguyen et.al., 2025)	110
Gambar 4.3 Sistem pelacakan di Vietnam untuk skala besar dan skala kecil (Nguyen et al., 2025).....	110
Gambar 4.4 Grafik Tren Rata-Rata Tahunan NTN 2020-2024	125
Gambar 4.5 Perkembangan Indeks Yang Harus Dibayar (Ib) dan Indeks Yang Diterima (It)	131
Gambar 4.6 Perangkat Sistem Pemantauan Kapal (VMS) (Viet Nam News, 2024).....	134
(sumber: https://vietnamnews.vn/society/1658091/vessel-monitoring-system-should-be-inspected-thoroughly.html).....	134

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Kapal Pelaku IUU <i>Fishing</i> yang Ditangkap oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2015-2023 GoodStats	4
Tabel 1.2 Skor IUU <i>Fishing</i> Negara ASEAN Tahun 2019, 2021 dan 2023	8
(Sumber: https://iuu fishing index.net/).....	8
Tabel 1.3 Kebijakan Vietnam dalam Penanganan IUU <i>Fishing</i> Periode Tahun 2014-2024	14
Tabel 1.4 Kebijakan Indonesia dalam Penanganan IUU <i>Fishing</i> Periode Tahun 2014-2024	15
Tabel 1.5 Peraturan terkait IUU <i>Fishing</i> dari negara Indonesia.....	18
Tabel 1.6 Daftar Peraturan terkait IUU <i>Fishing</i> dari negara Vietnam	25
Tabel 1.7 Penelitian Terdahulu (<i>Literatur Review</i>)	30
Tabel 2.1 Karakteristik Evaluasi Kebijakan Menurut William N. Dunn (Sumber: https://jurnal.syntaximperatif.co.id/index.php/syntax-imperatif/article/view/442/373)	62
Tabel 3.1 Lokasi Penelitian (Kebijakan Sentral dan Kontekstual) (sumber:Olah Data Peneliti, 2026).....	77
Tabel 4.1 Aktor Komandan dan Wakil Satgas berdasarkan Perpres 115/2015.....	82
(Sumber: https://setkab.go.id/prihatin-pencurian-ikan-presiden-jokowi-bentuk-satgas-pemberantasan-illegal-fishing/)	82
Tabel 4.2 Pembagian Aktor Penanganan dan Pendukung (Indonesia).....	83
Tabel 4.3 Aktor yang Terlibat dalam Memberantas Praktik IUU <i>Fishing</i> di Vietnam	85
Tabel 4.4 Operasionalisasi Indikator Efektivitas Kebijakan (Diadaptasi dari Teori Evaluasi William N. Dunn, Sumber: Olah Data Peneliti, 2026)	88
Tabel 4.5 Rekapitulasi Penindakan Kapal IUU <i>Fishing</i> (2014-2019) (sumber: https://jogja.antaranews.com/berita/397690/menteri-susi-pimpin-penenggelaman-19-kapal-di-tiga-kota)	93
Tabel 4.6 Rekapitulasi Kapal Ditangkap di perairan Indonesia (2019-2024)	94
(sumber: https://goodstats.id/article/mengulik-praktik-iuu-fishing-di-perairan-indonesia-dan-solusinya-TnkZm)	94
Tabel 4.7 Olah Data Peneliti (2026) Efektivitas Kebijakan Vietnam	100
Tabel 4.8 Standar Biaya Honorarium Operasi Patroli Laut.....	105
(sumber: https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/110-pmk-02-2015)	105

Tabel 4.9 Standar Biaya Honorarium Operasi Patroli Udara	106
(sumber: https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/110-pmk-02-2015)	106
Tabel 4.10 Standar Biaya Honorarium Pengamanan/Penyelamatan Instalasi/Sarana Operasi Pada Instalasi Kapal Patroli Laut. (sumber: https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/110-pmk-02-2015).....	107
Tabel 4.11 Status Implementasi eCDT (DOF, 2024) (sumber: https://repository.seafdec.org/handle/20.500.12066/7643)	111
Tabel 4.12 Jumlah Sertifikat yang Diterbitkan (Nguyen, 2025) (sumber: https://repository.seafdec.org/handle/20.500.12066/7643)	111
Tabel 4.13 Jumlah Akun Pengguna eCDT VN per Oktober 2024 (DOF 2024) (sumber: https://repository.seafdec.org/handle/20.500.12066/7643)	111
Tabel 4.14 Ketentuan Pelanggaran, Tanggung Jawab, dan Manajemen Perikanan (<i>Law on Fisheries</i> 2017).....	112
Tabel 4.15 Evolusi dan Perbandingan Regulasi Perikanan Vietnam (2019-2024)	115
Tabel 4.16 Sanksi Pidana Pelanggaran Berat Perikanan (Resolusi No. 04/2024/NQ-HDTP)	115
Tabel 4.17 Sanksi Administratif Pelanggaran Berat Perikanan (<i>Decree</i> No. 38/2024/ND-CP)	116
Tabel 4.18 Volume Produksi Perikanan Tangkap vs Budidaya (Ton) 2019-2023.....	118
(Sumber: Data diolah dari Rilis KKP, 2026).....	118
Tabel 4.19 Median Nilai Tukar Nelayan (NTN) Indonesia (2020-2025).....	126
(sumber: Olah Data Peneliti, 2026)	126
Tabel 4.20 Penegakan Hukum dan Dampak Keadilan (Sumber: https://www.vietnam.vn/id/khanh-hoa-ho-tro-cuoc-phi-he-thong-vms-cho-tau-ca /https://www.vietnam.vn/id/gan-2-000-tau-ca-se-duoc-ho-tro-phi-thue-bao-dich-vu-ve-tinh-vms).....	133
Tabel 4.21 Status Operasional dan Hasil KP dan Barakuda 01 dan 02	139
(sumber:Olah Data Peneliti, 2026)	139
Tabel 4.22 Ketentuan Teknis dalam <i>Decree</i> No. 37/2024/ND-CP yang merevisi <i>Decree</i> No. 26/2019/ND-CP	143
Tabel 4.23 Perbandingan Perubahan Regulasi Perikanan Vietnam (IUU <i>Fishing</i>)	145
Tabel 4.24 Perincian Ketentuan Sanksi dan Penegakan Hukum dalam <i>Decree</i> No. 301/2025	147
Tabel 4.25 Indikator Ketepatan Kebijakan Indonesia	150

(sumber:Olah Data Peneliti, 2026)	150
Tabel 4.26 Penurunan kapal IUU <i>Fishing</i> 48% 2021-2023 membuktikan ketepatan kebijakan (KKP, 2024; Goodstats, 2023)	151
(sumber: https://kkp.go.id/news/news-detail/kkp-berhasil-selamatkan-rp31-triliun-kerugian-negara-dari-illegal-fishing.html / https://goodstats.id/article/mengulik-praktik-iuu-fishing-di-perairan-indonesia-dan-solusinya-TnkZm/).....	151
Tabel 2.27 Indikator Ketepatan Kebijakan Vietnam IUU <i>Fishing</i> 2019-2024	154
(sumber:Olah Data Peneliti, 2026)	154
Tabel 4.28 Sintesis Efektivitas Kebijakan Indonesia dan Vietnam dalam Menekan IUU <i>Fishing</i>	156
(Sumber: Olah Data Peneliti, 2026)	156

GLOSARIUM

<i>AIS (Automatic Identification System)</i>	Sistem pelacakan otomatis yang digunakan pada kapal untuk mengirimkan data identitas, posisi, arah, dan kecepatan kapal ke kapal lain atau stasiun pantai guna mencegah tabrakan dan memantau lalu lintas laut.
<i>Allowable Catch (JTB - Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan)</i>	Batas maksimum volume ikan yang diizinkan untuk ditangkap di suatu wilayah perairan tertentu dalam periode waktu tertentu, biasanya ditetapkan sebesar 80% dari potensi lestari (<i>Maximum Sustainable Yield</i>) untuk mencegah <i>overfishing</i> .
<i>Appropriateness (Ketepatan)</i>	Salah satu indikator evaluasi kebijakan William N. Dunn yang menilai apakah tujuan dan hasil dari suatu kebijakan benar-benar relevan, berguna, dan sesuai dengan nilai-nilai atau kebutuhan pembangunan negara.
BAKAMLA (Badan Keamanan Laut Republik Indonesia)	Lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan yurisdiksi Indonesia (sering disebut sebagai <i>Indonesian Coast Guard</i>).
<i>Blue Economy (Ekonomi Biru)</i>	Konsep pemanfaatan sumber daya laut untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, dan lapangan kerja, dengan tetap menjaga kesehatan ekosistem laut (keberlanjutan).
<i>Bottom-Up Approach</i>	Pendekatan implementasi kebijakan yang menekankan peran penting birokrat tingkat bawah atau petugas lapangan (seperti petugas patroli) dalam menerjemahkan kebijakan pusat sesuai dengan realitas di lapangan.
<i>CCRF (Code of Conduct for Responsible Fisheries)</i>	Kode etik tata laksana perikanan yang bertanggung jawab yang diterbitkan oleh FAO pada tahun 1995 sebagai pedoman global untuk pengelolaan perikanan berkelanjutan.
<i>Command Center KKP</i>	Pusat kendali terpadu milik Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menggunakan teknologi satelit dan digital untuk memantau pergerakan kapal perikanan secara <i>real-time</i> selama 24 jam.
<i>Compliance (Kepatuhan)</i>	Tingkat ketaatan aktor (negara, kapal, atau nelayan) terhadap aturan, regulasi, atau standar internasional yang berlaku.
<i>Decree (Dekrit/Keputusan Pemerintah)</i>	Istilah hukum yang digunakan di Vietnam untuk menyebut peraturan pelaksanaan undang-undang yang diterbitkan oleh Perdana Menteri atau Pemerintah (contoh: <i>Decree</i> No. 37/2024/ND-CP).

Dekapitalisasi	Strategi kebijakan (seperti penenggelaman kapal) yang bertujuan menghancurkan modal atau aset pelaku kejahatan agar mereka kehilangan kemampuan finansial dan operasional untuk melakukan kejahatan kembali.
<i>Deterrence Effect</i> (Efek Jera)	Dampak psikologis yang ditimbulkan oleh ancaman sanksi atau hukuman yang berat (seperti penenggelaman atau denda tinggi), sehingga mencegah pelaku untuk melakukan pelanggaran hukum.
D-Fish (Directorate of Fisheries)	Direktorat Perikanan Vietnam yang berada di bawah Kementerian Pertanian dan Pembangunan Pedesaan (MARD), bertanggung jawab atas pengelolaan teknis perikanan nasional.
<i>e-CDT (Electronic Catch Documentation and Traceability)</i>	Sistem dokumentasi dan ketertelusuran hasil tangkapan ikan berbasis elektronik/digital yang digunakan (terutama di Vietnam) untuk mencatat perjalanan ikan dari laut hingga ke pelabuhan guna mencegah masuknya ikan ilegal.
Efektivitas (<i>Effectiveness</i>)	Indikator evaluasi kebijakan yang mengukur sejauh mana hasil yang diinginkan (tujuan kebijakan) telah berhasil dicapai.
Efisiensi (<i>Efficiency</i>)	Indikator evaluasi kebijakan yang mengukur rasio antara usaha (biaya/sumber daya) yang dikeluarkan dengan hasil yang dicapai.
<i>Equity</i> (Pemerataan)	Indikator evaluasi kebijakan yang menilai apakah biaya dan manfaat dari suatu kebijakan didistribusikan secara adil kepada seluruh kelompok sasaran (misalnya antara nelayan kecil dan industri).
FAO (<i>Food and Agriculture Organization</i>)	Organisasi Pangan dan Pertanian di bawah PBB yang memimpin upaya internasional untuk mengalahkan kelaparan dan mengatur standar perikanan global.
<i>Fisheries Law 2017</i>	Undang-Undang Perikanan Vietnam tahun 2017 yang menjadi dasar reformasi hukum perikanan Vietnam untuk memenuhi standar internasional dan mencabut status <i>Yellow Card</i>
<i>Gross Ton</i> (GT)	Satuan volume kotor kapal yang digunakan untuk menentukan ukuran kapal. Di Indonesia, kapal <10 GT dikategorikan sebagai kapal nelayan kecil.
IPOA-IUU (<i>International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate IUU Fishing</i>)	Rencana aksi internasional yang diadopsi oleh FAO pada tahun 2001 sebagai panduan bagi negara-negara untuk memerangi IUU Fishing. Rencana aksi internasional yang diadopsi oleh FAO pada tahun 2001 sebagai panduan bagi negara-negara untuk memerangi IUU Fishing.

IUU Fishing (<i>Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing</i>)	Illegal: Kegiatan penangkapan ikan yang melanggar hukum negara atau perjanjian internasional. Unreported: Kegiatan penangkapan yang tidak dilaporkan atau dilaporkan secara salah kepada otoritas berwenang. Unregulated: Kegiatan penangkapan di area yang tidak diatur atau dilakukan oleh kapal tanpa kebangsaan (<i>stateless</i>).
Kedaulatan (<i>Sovereignty</i>)	Kekuasaan tertinggi suatu negara atas wilayahnya (termasuk laut teritorial) untuk mengatur dan menegakkan hukum tanpa campur tangan negara lain.
Kiem Ngu (<i>Vietnam Fisheries Surveillance</i>)	Pasukan pengawas perikanan Vietnam yang bertugas melakukan patroli sipil dan penegakan hukum perikanan di laut, terpisah dari militer namun memiliki wewenang penindakan.
KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan)	Kementerian di Indonesia yang bertanggung jawab atas urusan kelautan dan perikanan, dipimpin oleh seorang Menteri.
KP (Kapal Pengawas)	Armada kapal milik pemerintah (KKP/PSDKP) yang digunakan untuk patroli dan pengawasan sumber daya kelautan (Contoh: KP. Barakuda, KP. Paus).
KUSUKA (Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan)	Kartu identitas bagi pelaku usaha (nelayan, pembudidaya) di Indonesia yang digunakan sebagai basis data untuk penyaluran bantuan pemerintah, termasuk BBM subsidi.
LOA (<i>Length Overall</i>)	Panjang keseluruhan kapal yang diukur dari ujung haluan hingga ujung buritan. Digunakan di Vietnam untuk klasifikasi kapal (misal: kapal >15 meter wajib VMS).
<i>Logbook</i>	Buku catatan harian kapal perikanan yang berisi data operasional penangkapan (lokasi, jenis ikan, jumlah tangkapan) yang wajib diisi oleh nakhoda.
MARD (<i>Ministry of Agriculture and Rural Development</i>)	Kementerian Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Vietnam, lembaga setingkat kementerian yang membawahi urusan perikanan di Vietnam.
MSY (<i>Maximum Sustainable Yield</i>)	Potensi lestari maksimum, yaitu jumlah tangkapan terbesar yang dapat diambil dari stok spesies ikan dalam jangka waktu tak terbatas tanpa menguras stok tersebut.
<i>National Steering Committee on IUU Fishing</i>	Komite Pengarah Nasional di Vietnam yang dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri, bertugas mengkoordinasikan penanganan IUU Fishing di seluruh kementerian dan 28 provinsi pesisir.
NMSS (<i>National Maritime Surveillance System</i>)	Sistem pengawasan maritim nasional terintegrasi yang diajukan oleh Bakamla untuk memantau pergerakan kapal di seluruh perairan Indonesia menggunakan radar dan sensor.

NTN (Nilai Tukar Nelayan)	Indikator kesejahteraan nelayan di Indonesia yang diukur dari rasio indeks harga yang diterima nelayan (pendapatan) terhadap indeks harga yang dibayar nelayan (pengeluaran). Angka >100 berarti surplus/sejahtera.
PIT (Penangkapan Ikan Terukur)	Kebijakan pengelolaan perikanan di Indonesia berbasis kuota dan zonasi penangkapan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan (diatur dalam PP No. 11 Tahun 2023).
POKMASWAS (Kelompok Masyarakat Pengawas)	Kelompok masyarakat (nelayan) di Indonesia yang dibentuk dan dibina untuk membantu pemerintah dalam mengawasi dan melaporkan tindak pidana perikanan di wilayahnya.
Polairud (Polisi Air dan Udara)	Satuan di dalam Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian di wilayah perairan dan udara.
PSDKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan)	Direktorat Jenderal di bawah KKP Indonesia yang bertugas melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan.
PSMA (<i>Port State Measures Agreement</i>)	Perjanjian internasional yang mewajibkan negara pelabuhan untuk memeriksa kapal
Realisme	Teori hubungan internasional yang memandang negara sebagai aktor utama yang bertindak rasional untuk mengejar kepentingan nasional (<i>national interest</i>), kekuasaan (<i>power</i>), dan keamanan (<i>security</i>) dalam sistem internasional yang anarki.
Responsiveness (Responsivitas)	Indikator evaluasi kebijakan yang mengukur seberapa baik suatu kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai dari kelompok sasaran.
RFMO (<i>Regional Fisheries Management Organization</i>)	Organisasi internasional yang dibentuk oleh negara-negara yang memiliki kepentingan perikanan di suatu wilayah tertentu untuk mengelola dan melestarikan stok ikan (contoh: WCPFC, IOTC).
Satgas 115 (Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal)	Satuan tugas khusus di Indonesia yang dibentuk melalui Perpres No. 115 Tahun 2015 untuk memberantas <i>Illegal Fishing</i> melalui operasi gabungan (KKP, TNI AL, Polri, Bakamla, Kejaksaan).
SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan)	Izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan)	Izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan).

SISWASMAS (Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat)	Sistem pengawasan yang melibatkan peran serta aktif masyarakat dalam mengawasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.
STELINA (Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional)	Platform digital Indonesia untuk pelacakan (<i>traceability</i>) hulu-hilir produk perikanan guna memenuhi standar pasar global dan mencegah <i>IUU Fishing</i> .
<i>Top-Down Approach</i>	Pendekatan implementasi kebijakan yang menekankan pada komando dari pejabat tingkat pusat/tinggi ke tingkat bawah, dengan asumsi bahwa kebijakan akan berjalan sesuai instruksi pimpinan.
<i>Traceability</i> (Ketertelusuran)	Kemampuan untuk melacak jejak riwayat, aplikasi, atau lokasi dari produk perikanan mulai dari titik penangkapan hingga sampai ke konsumen akhir.
<i>Transshipment</i>	Kegiatan memindahkan muatan (ikan) dari satu kapal ke kapal lain di tengah laut. Praktik ini sering dilarang atau diatur ketat karena rawan digunakan untuk pencucian ikan ilegal (<i>fish laundering</i>)
<i>Trawl</i> (Pukat Harimau)	Alat penangkapan ikan berupa jaring kantong yang ditarik oleh kapal, yang sering dilarang karena sifatnya yang merusak dasar laut dan menangkap semua jenis ikan kecil (non-selektif).
UNCLOS 1982 (<i>United Nations Convention on the Law of the Sea</i>)	Konvensi PBB tentang Hukum Laut yang menetapkan kerangka hukum komprehensif yang mengatur semua aktivitas di laut, termasuk hak dan kewajiban negara di berbagai zona maritim.
VMS (<i>Vessel Monitoring System</i>)	Sistem pemantauan kapal perikanan berbasis satelit yang memungkinkan otoritas untuk mengetahui posisi, pergerakan, dan aktivitas kapal secara <i>real-time</i> .
<i>VNFishbase</i>	Basis data perikanan nasional Vietnam yang berisi registrasi seluruh armada kapal perikanan, data perizinan, dan riwayat kepatuhan untuk integrasi pengelolaan perikanan.
WPP-NRI (Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia)	Wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan ZEE Indonesia.
<i>Yellow Card</i> (Kartu Kuning)	Peringatan resmi yang dikeluarkan oleh Komisi Eropa (Uni Eropa) kepada negara pengekspor ikan yang dinilai tidak kooperatif atau gagal dalam upaya memberantas <i>IUU Fishing</i> . Jika tidak diperbaiki, status ini bisa naik menjadi <i>Red Card</i> (pelarangan ekspor total).
ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif)	Suatu zona selebar tidak lebih dari 200 mil laut dari garis pangkal, di mana negara pantai mempunyai hak berdaulat untuk

	mengeksplorasi, mengeksploitasi, mengkonservasi, dan mengelola sumber daya alam hayati dan non-hayati.
--	--